

---

## **Penyuluhan manajemen pembiayaan pendidikan yang berkelanjutan bagi pengelola pendidikan anak usia dini**

**Siti Sanisah<sup>1</sup>, Nurin Rochayati<sup>1</sup>, Muhammad Alfin Tarmizi<sup>1</sup>, Irmawati M. Banmalei<sup>1</sup>, Lia Azali<sup>1</sup>, Nurul Watoni<sup>2</sup>, Baiq Rauhun<sup>2</sup>, Ipayati<sup>2</sup>,**

<sup>1</sup>Program Studi Pendidikan Geografi, Universitas, Muhammadiyah Mataram

<sup>2</sup>Program Studi Pendidikan Profesi Guru, Universitas, Muhammadiyah Mataram

Penulis korespondensi : Siti Sanisah

E-mail : sitisanisah25@gmail.com

Diterima: 14 Juli 2024 | Direvisi: 18 Agustus 2024 | Disetujui: 19 Agustus 2024 | © Penulis 2024

### **Abstrak**

Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memberi penguatan tentang manajemen pembiayaan pendidikan yang berkelanjutan kepada pengelola PAUD. Pengabdian dilakukan secara langsung dengan memberikan penyuluhan melalui tahapan koordinasi awal, perencanaan, pelaksanaan penyuluhan, kontrol dan evaluasi, serta penyusunan laporan. Mitra strategis selama pelaksanaan pengabdian adalah IGTKI Kecamatan Jonggat dengan melibatkan 26 orang pengelola PAUD di Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah sebagai sasaran penyuluhan. Pengabdian berproses dengan baik, pelaksanaan kegiatan sesuai dengan hasil koordinasi awal dan perencanaan yang sudah disusun sebelumnya, terdapat peningkatan pengetahuan peserta dari 55 (*pre-test*) menjadi 94 (*post-test*), dan terpenuhinya indikator keberhasilan proses penyuluhan. Untuk memaksimalkan capaian, disarankan agar pemerintah atau *stakeholder* lebih memperhatikan penyelenggaraan PAUD dengan cara memberikan dampingan dan pembinaan secara intens, termasuk dalam hal pengelolaan pembiayaan pendidikan yang berkelanjutan agar pengelolaan pendidikan menjadi lebih terarah, efektif, dan efisien menuju pendidikan bermutu untuk semua.

**Kata kunci:** penyuluhan; manajemen; pembiayaan pendidikan berkelanjutan; pendidikan anak usia dini

### **Abstract**

This community service aims to reinforce sustainable education financing management to PAUD managers. The service is carried out directly by providing counseling through initial coordination, planning, implementation of counseling, control and evaluation, and preparation of reports. The strategic partner during the implementation of the service was IGTKI Jonggat Subdistrict involving 26 PAUD managers in Jonggat Subdistrict, Central Lombok Regency as the counseling target. The service process went well, the implementation of activities resulted from the initial coordination and planning that had been prepared previously, there was an increase in participant knowledge from 55 (*pre-test*) to 94 (*post-test*), and the fulfillment of the success indicators of the extension process. To maximize achievements, it is recommended that the government or stakeholders pay more attention to the implementation of PAUD by providing intense assistance and guidance, including in terms of sustainable education financing management so that education management becomes more directed, effective, and efficient towards quality education for all.

**Keywords:** extension; management; financing continuing education; early childhood education

---

## PENDAHULUAN

Manajemen pembiayaan pendidikan merupakan segenap aktivitas yang terkait dengan penataan sumber, penggunaan, dan pertanggung-jawaban dana pendidikan di sekolah atau satuan pendidikan. Aktivitas dimaksud meliputi tiga hal pokok, yaitu *budgeting*, *accounting*, dan *controlling* (Lee et al., 2013). *Budgeting* dilakukan untuk merencanakan dan mengkoordinir semua sumber daya yang tersedia untuk mencapai sasaran yang diinginkan secara sistematis dalam penyelenggaraan pendidikan. *Accounting* merupakan aktivitas implementasi atau penggunaan dana berdasarkan perencanaan, dan *controlling*, sebagai proses penilain pelaksanaan program untuk mencapai tujuan. Proses ini condong pada pembuktian kesesuaian antara perencanaan yang sudah dibuat sebelumnya dengan pelaksanaan, meliputi proses penerimaan dana, penyimpanan, pengeluaran, pertanggungjawaban, dan proporsionalitas (Susanto, 2019).

Eksistensi uang sangat penting dalam pelaksanaan proses pendidikan, dan termasuk ke dalam sumber daya pendidikan yang sangat terbatas (Sanisah, 2023). Pilihan logisnya adalah pembiayaan pendidikan harus di-*manage* dengan baik agar pemanfaatannya efektif dan efisien, serta tidak menjadi faktor penghambat dalam mencapai tujuan pendidikan. Bagaimana pun juga, pendidikan merupakan wadah investasi yang diharap menghasilkan sumber daya manusia dengan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dibutuhkan dalam pembangunan bangsa. Mengingat, manajemen pembiayaan pendidikan (nirlaba) berbeda dengan perusahaan yang berorientasi profit atau laba, maka harus diformat secara berkelanjutan sesuai karakteristik pendidikan. Manajemen pembiayaan pendidikan ini merujuk pada pendekatan yang bertujuan untuk memastikan akses, kualitas, dan kesetaraan dalam pendidikan dengan mempertimbangkan keberlanjutan finansial. Sistem pembiayaan pendidikan dikelola sedemikian rupa, melalui serangkaian strategi sehingga dapat memenuhi kebutuhan pendidikan saat ini dan masa mendatang (Ziolo & Sergi, 2019).

Pengelolaan pembiayaan pendidikan pada lembaga PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) yang diformat melalui BOP (Bantuan Operasional Penyelenggaraan) PAUD perlu memperhatikan beberapa prinsip pokok dalam manajemen pembiayaan pendidikan berkelanjutan. Prinsip dimaksud meliputi (1) keterjangkauan finansial, pembiayaan dapat diakses semua lapisan masyarakat, termasuk yang kurang mampu; (2) kualitas pendidikan, sumber daya yang tersedia cukup untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas pendidikan, termasuk pelatihan guru, pengembangan kurikulum, dan fasilitas pendidikan yang memadai; (3) kesetaraan dan aksesibilitas, pembiayaan fokus pada kesetaraan dan aksesibilitas pendidikan, sehingga semua individu memiliki kesempatan sama mendapatkan pendidikan berkualitas; dan (4) kesinambungan, sumber daya finansial dikelola secara efisien dan efektif untuk memastikan keberlangsungan pendidikan dalam jangka panjang tanpa mengalami kekurangan dana secara tiba-tiba (Hidayat et al., 2023; Ziolo & Sergi, 2019).

Sejak tahun 2002, pembiayaan pendidikan pada satuan PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) diformat dalam BOP (Bantuan Operasional Penyelenggaraan), yang dewasa ini memiliki besaran Rp.600.000,-/siswa. BOP merupakan dana yang digunakan untuk biaya operasional nonpersonalia dalam mendukung kegiatan pembelajaran pendidikan anak usia dini yang terdiri dari BOP Reguler dan Kinerja (Murdianingrum et al., 2020). BOP Reguler adalah dana yang diberikan kepada satuan pendidikan untuk membantu operasional satuan PAUD, diberikan akhir bulan Januari untuk tahap pertama dan Juni untuk tahap kedua. Sementara BOP Kinerja merupakan dana yang diberikan kepada satuan pendidikan sebanyak satu kali dalam satu tahun untuk mendukung kegiatan program sekolah penggerak bagi PAUD yang ditetapkan sebagai pelaksana program sekolah penggerak.

Temuan penelitian sebelumnya membuktikan bahwa manajemen pembiayaan pendidikan pada satuan pendidikan atau sekolah belum dikelola secara maksimal dan menyisakan problematika tersendiri. Pada tataran makro, pencairan BOP Reguler yang hanya dua kali dalam satu tahun dikeluhkan oleh banyak pengelola pada satuan PAUD, terutama yang berada di daerah pelosok, selain karena durasi yang cukup lama, pencairan BOP PAUD juga sering terlambat (Murdianingrum et al., 2020). Kondisi ini, diperparah rumitnya birokrasi dengan berbagai dokumen yang harus disiapkan dan disetor lembaga pendidikan, membutuhkan tenaga ekstra dan waktu yang tidak sedikit.

Penyuluhan manajemen pembiayaan pendidikan yang berkelanjutan bagi pengelola pendidikan anak usia dini.

Kondisi ini ekuivalen dengan biaya operasional yang harus dikeluarkan pengelola PAUD untuk sampai ke kantor Dinas Pendidikan (Sanisah et al., 2024).

Dinamika pada level meso berbeda, dokumen RKAS (Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan) BOP PAUD akan dikoreksi sedemikian rupa oleh pengelola BOP di tingkat kabupaten (Dinas Pendidikan). Tidak jarang pihak pengelola PAUD harus bolak-balik beberapa kali ke kantor Dinas Pendidikan untuk memperbaiki dokumen yang disinyalir salah atau belum sesuai dengan kriteria. Kesesuaian dokumen dimaksud bersifat menyeluruh, baik dalam konteks format maupun program dan pembiayaan yang diusulkan. Hal lain yang menjadi kewajiban pengelola PAUD adalah pengelola harus menyampaikan dokumen realisasi dan pertanggungjawaban penggunaan BOP PAUD pada tahap sebelumnya agar dapat mengakses BOP untuk tahap selanjutnya (Sanisah et al., 2024).

Tuntutan untuk mengelola pembiayaan dengan berpegang pada prinsip manajemen keuangan sekolah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Pasal 48) seringkali diabaikan oleh pihak satuan pendidikan di tingkat mikro. Pada regulasi dimaksud tertera dengan jelas bahwa pengelolaan dana pendidikan harus dilakukan berdasarkan prinsip transparansi (keterbukaan sumber keuangan, jumlah, rincian penggunaan, dan sebagainya), akuntabilitas (dapat dipertanggungjawabkan sesuai perencanaan yang telah ditetapkan), efektivitas (kualitas *outcome* sesuai rencana), dan efisiensi yang terkait kuantitas hasil sangat bagus perbandingan yang terbaik antara input (pikiran, waktu, dan biaya) dan *output* (Muhajir et al., 2023).

Dinamika dan kondisi tersebut juga dialami pengelola PAUD di wilayah Kabupaten Lombok Tengah, termasuk di Kecamatan Jonggat yang merupakan indikasi awal bahwa manajemen pembiayaan pendidikan belum dikelola dengan baik. Banyaknya jumlah PAUD dengan jalur, bentuk, dan status berbeda menjadi dilema tersendiri bagi Dinas Pendidikan untuk melakukan pembinaan, terlebih pada lembaga yang nonformal, sehingga manajemen pembiayaan pendidikan cenderung diserahkan kepada satuan pendidikan. Pengelola keuangan, hanya diberi masukan ketika melakukan konsultasi di Dinas Pendidikan, dan hal tersebut dominan terkait dengan format, serta kesesuaian program dengan jumlah anggaran (Sanisah et al., 2024).

Jumlah PAUD di Kecamatan Jonggat mencapai 95 lembaga yang terpilah menjadi 43 PAUD formal dan 52 PAUD nonformal. PAUD Jalur Formal tersebut sebanyak 36 lembaga berbentuk TK (Taman Kanak-Kanak), dan 7 berbentuk RA (Raudatul Atfal). PAUD jalur nonformal, terpilah bagi menjadi 47 PAUD berbentuk KB (Kelompok Bermain), dan 5 lembaga berbentuk SPS (Satuan PAUD Sejenis). Berdasarkan wawancara awal dengan Ketua IGTKI (Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia) Kecamatan Jonggat diketahui bahwa dari keseluruhan lembaga PAUD yang ada, hingga saat ini belum pernah mengikuti pelatihan, pendampingan, atau arahan tentang manajemen pembiayaan pendidikan yang berkelanjutan. Dalam penyusunan RKAS, mereka cenderung mengikuti dokumen pada tahun sebelumnya atau *copy paste* dari lembaga lain.

Manajemen pembiayaan pendidikan penting untuk diaplikasikan karena sekolah bukan lembaga profit, masyarakat dan orang tua siswa memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap penerimaan sekolah digunakan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan pendidikan yang profesional (Mesiono & Haidir, 2020). Dalam konteks ini, penting untuk mampu mengelola penggunaan dana secara transparan dan akuntabel, meningkatkan efektivitas dan efisiensi biaya, meminimalisir penyalahgunaan dana, kreatif menggali sumber pendanaan, dan menempatkan pengelola yang kompeten dan profesional (Sudarmono et al., 2021). Terpenting adalah melakukan pengelolaan pembiayaan pendidikan berkelanjutan sehingga prinsip manajemen keuangan di lingkungan sekolah yang tercantum dalam regulasi dapat diimplementasikan dengan baik.

Dihadapkan pada permasalahan yang dialami mitra dan urgensi PAUD bagi pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di masa mendatang, maka langkah konkrit untuk meminimalisir permasalahan dimaksud adalah melakukan kegiatan pengabdian masyarakat. Kegiatan dimaksud dikemas dalam bentuk penyuluhan yang bertujuan untuk memberi penguatan tentang manajemen pembiayaan pendidikan yang berkelanjutan kepada pengelola PAUD di wilayah Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah.

Penyuluhan manajemen pembiayaan pendidikan yang berkelanjutan bagi pengelola pendidikan anak usia dini.

## METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan ini bermitra dengan IGTKI (Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia) Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah dengan melibatkan 26 orang perwakilan pengelola lembaga sebagai peserta penyuluhan, 4 orang tim, dan 3 orang panitia yang berasal dari pengurus IGTKI Kecamatan Jonggat. Lokasi penyuluhan bertempat di sekretariat IGTKI Kecamatan Jonggat di Desa Ubung Kecamatan Jonggat.

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dalam upaya menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh mitra dilakukan dalam bentuk penyuluhan dengan sasaran pengelola PAUD yang berada di wilayah Kecamatan Jonggat. Pelaksanaan pengabdian secara umum dilakukan dalam empat tahapan penting yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan *control* (Maemunah & Isnaini, 2023), sebagaimana tampak pada Gambar 1.



**Gambar 1.** Tahapan Kegiatan Pengabdian Masyarakat

Sesuai Gambar 1, terdapat tiga kegiatan penting yang dilaksanakan pada tahap perencanaan, yaitu koordinasi awal dengan mitra, pembentukan tim pengabdian, dan menyusun proposal pengabdian. Pelaksanaan ketiga kegiatan tersebut diharap dapat bermuara pada adanya kesepakatan atau kesediaan mitra untuk bekerjasama dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat, terbentuknya tim pengabdian yang solid, tersusunnya desain pengabdian dalam proposal, dan persetujuan pelaksanaan pengabdian dari institusi. Sementara pada tahap pengorganisasian juga akan dilakukan tiga kegiatan utama yaitu pembagian tugas, persiapan pelaksanaan, dan penentuan jadwal pelaksanaan pengabdian (penyuluhan). Target pelaksanaan kegiatan pada tahap ini adalah terbentuknya spesifikasi tugas masing-masing personil dalam tim pengabdian, identifikasi kebutuhan selama dalam pelaksanaan pengabdian, hingga disepakatinya jadwal kegiatan yang akan dijadikan sebagai kompas dalam pelaksanaan pengabdian.

Pelaksanaan pengabdian yang diformat dalam bentuk penyuluhan setidaknya memiliki susunan acara sebagai berikut yaitu sambutan, pelaksanaan *pre-test*, penyampaian materi, dan diskusi (tanya jawab). Indikator yang dijadikan acuan keberhasilan pelaksanaan penyuluhan adalah adanya perubahan perilaku (Soemarti & Kundrat, 2022) sebagaimana digambarkan pada Tabel 1 berikut.

**Tabel 1.** Indikator Keberhasilan Penyuluhan

| Indikator         | Kriteria  |
|-------------------|---|
| <i>Arwarness</i>  | Mendengar penuh perhatian; tertarik; mengetahui                             |
| <i>Interest</i>   | Mencari informasi secara aktif; mengerti                                    |
| <i>Evaluation</i> | Menyatakan keinginan; menyatakan persetujuan/menolak; menghitung keuntungan |
| <i>Trial</i>      | Mulai melaksanakan; mencoba dalam skala kecil                               |
| <i>Adoption</i>   | Selalu melaksanakan; selalu mencari penyempurnaan                           |

Penyuluhan manajemen pembiayaan pendidikan yang berkelanjutan bagi pengelola pendidikan anak usia dini.

Tahap akhir dalam pelaksanaan pengabdian adalah kontrol yang diisi dengan pelaksanaan *post-test*, testimoni dari peserta, dan kesepakatan tentang rencana tindak lanjut. Dari kegiatan ini diharapkan dapat diperoleh gambaran selama pelaksanaan penelitian, efektivitas pendekatan yang dipilih dalam pelaksanaan pengabdian, peningkatan pemahaman, dan juga tantangan serta solusi dalam menghadapi tantangan yang ada.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Perencanaan

Kegiatan yang dilakukan pada tahap perencanaan adalah koordinasi awal, pembentukan tim, dan menyusun desain kegiatan pengabdian dalam bentuk proposal. Keberhasilan koordinasi awal yang merupakan kegiatan pertama dalam tahap perencanaan ditandai dengan adanya MoU (*Memorandum of Understanding*) antara tim pengabdian masyarakat dengan IGTKI Kecamatan Jonggat untuk bersama-sama mensukseskan kegiatan penyuluhan. Kesepakatan dituangkan dalam bentuk surat pernyataan kesediaan untuk bekerjasama dalam kegiatan pengabdian masyarakat yang ditandatangani oleh Ketua IGTKI Kecamatan Jonggat. Bersamaan dengan koordinasi awal, dilakukan juga observasi singkat untuk memahami lebih jauh tentang kondisi mitra.



**Gambar 2.** Komunikasi dan Koordinasi dengan Pengurus IGTKI Jonggat

Pembentukan tim kerja didasarkan pada pertimbangan kapasitas dan komitmen tim untuk terlibat aktif dalam pelaksanaan pengabdian hingga selesai. Musyawarah pembentukan tim kerja menghasilkan kesepakatan tentang jumlah tim kerja sebanyak 4 orang yaitu 1 orang dosen dengan 3 orang mahasiswa yang seluruhnya berasal dari Program Studi Pendidikan Geografi. Mahasiswa dimaksud merupakan mahasiswa dengan status aktif belajar pada semester 8, 6, dan 4. Selain itu, disepakati juga struktur tim kerja. Eksistensi tim kerja dalam pelaksanaan pengabdian diyakini sangat berperan terhadap pelaksanaan kegiatan (Basir, 2015; Rahmawati & Supriyanto, 2020).

Selanjutnya, semua tim kerja melakukan aktivitas bersama dengan peran masing-masing untuk menyusun proposal pengabdian masyarakat. Proposal final diserahkan ke LPPM Universitas Muhammadiyah Mataram sekaligus sebagai usulan kegiatan dan permohonan pendanaan.

### Pengorganisasian

Pengorganisasian kegiatan dilakukan setelah adanya persetujuan terhadap proposal yang disampaikan kepada LPPM. Persetujuan dimaksud tertera dalam Surat Keputusan penerima hibah internal dari Universitas Muhammadiyah Mataram untuk pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan pokok yang dilakukan dalam pengorganisasian adalah pembagian tugas masing-masing tim (ketua dan anggota). Agar pelaksanaan menjadi terarah dan terfokus, dilakukan pembagian tugas dalam bentuk *job description* (Dakhi, 2016) untuk masing-masing personil tim, yaitu ketua tim bertanggung jawab atas keseluruhan pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat, dan anggota tim masing-masing bertugas membantu aktivitas yang dilakukan ketua sesuai arahan yang

Penyuluhan manajemen pembiayaan pendidikan yang berkelanjutan bagi pengelola pendidikan anak usia dini.

disampaikan. Berdasarkan *job description* masing-masing, dilakukan persiapan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat.

Media dan alat yang dibutuhkan dan dipersiapkan dalam penyuluhan berupa perangkat IT seperti laptop, *whiteboard* dan *boardmaker*, serta sarana dan prasarana lainnya. Materi penyuluhan akan disiapkan oleh pendamping dalam bentuk *hard* dan *soft file* yang akan digandakan sendiri oleh mitra, sehingga lebih memudahkan tim. Kesiapan mitra untuk terlibat aktif dalam kegiatan pengabdian diyakini dapat memperlancar proses pengabdian masyarakat yang akan dilakukan. Terakhir, dilakukan penyusunan *rundown* termasuk jadwal kegiatan dalam bentuk ToR (*Term of Reference*) sebagai panduan pelaksanaan penyuluhan.

## Pelaksanaan

Pelaksanaan pengabdian masyarakat dilakukan dalam bentuk penyuluhan sehari tentang manajemen pembiayaan pendidikan yang berkelanjutan. Penyuluhan adalah upaya perubahan perilaku yang dilakukan melalui pendekatan edukatif (Maemunah & Isnaini, 2023). Pendekatan edukatif dapat dipahami sebagai rangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan terarah dengan peran serta aktif peserta untuk memecahkan masalah. Pemilihan bentuk penyuluhan didasarkan pada pertimbangan bahwa dengan melakukan penyuluhan dapat diharapkan terjadinya perubahan pada peserta dalam konteks manajemen pembiayaan pendidikan yang berkelanjutan. Perubahan dimaksud meliputi perubahan tingkat pengetahuan, tingkat kecakapan atau kemampuan, sikap, dan perubahan motif tindakan. Penyuluhan dilakukan secara berkelompok menggunakan metode ceramah, dan diskusi mendalam (Dewi et al., 2023) dengan memperhatikan 5 tahap perubahan perilaku peserta yaitu *awariness*, *interest*, *evaluation*, *trial*, dan *adoption* (Soemarti & Kundrat, 2022) seperti tampak pada Tabel 1.

Memperkuat eksistensi dan urgensi pengelolaan lembaga PAUD yang harus optimal maka dilakukan penyuluhan dengan tujuan memperkuat kapasitas pengelola PAUD tentang manajemen pembiayaan pendidikan yang berkelanjutan. Penyuluhan terdiri dari empat sesi aktivitas, yaitu pembukaan dan pengenalan narasumber serta peserta yang hadir dalam kegiatan penyuluhan, menyampaikan penyuluhan, diskusi dan tanya jawab, serta evaluasi. Pembukaan diisi dengan sambutan yang disampaikan oleh Ketua IGTKI Kecamatan Jonggat menyampaikan sambutan serta menyampaikan maksud dan tujuan pelaksanaan penyuluhan. Sambutan kedua disampaikan pengawas pembina PAUD Kecamatan Jonggat sebagaimana tampak pada Gambar 3 tentang penting dan bermanfaatnya materi yang akan disampaikan dalam kegiatan penyuluhan.



Gambar 3. Sambutan Pengawas Pembina

Manajemen pembiayaan pendidikan yang berkelanjutan pada lembaga pendidikan anak usia dini (PAUD) merupakan aspek krusial yang menentukan kualitas dan kelangsungan layanan pendidikan yang diberikan. Pembiayaan yang berkelanjutan memastikan bahwa lembaga dapat menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk mendukung perkembangan anak secara optimal. Dalam manajemen pembiayaan ini, ada beberapa elemen penting yang perlu diperhatikan, yaitu perencanaan anggaran, diversifikasi sumber pendanaan, dan pengelolaan dana yang transparan dan akuntabel. Perencanaan anggaran yang matang adalah langkah pertama dalam manajemen

Penyuluhan manajemen pembiayaan pendidikan yang berkelanjutan bagi pengelola pendidikan anak usia dini.

pembiayaan yang berkelanjutan. Lembaga PAUD harus mampu merencanakan anggaran yang realistis dan sesuai kebutuhan operasional serta program-program pengembangan yang direncanakan. Ini mencakup alokasi dana untuk gaji tenaga pendidik, pembelian bahan ajar, pemeliharaan fasilitas, serta kegiatan-kegiatan ekstra kurikuler. Perencanaan yang baik juga mencakup antisipasi terhadap kemungkinan kebutuhan mendesak atau darurat sehingga lembaga tidak mengalami kesulitan finansial yang signifikan.

Diversifikasi sumber pendanaan juga merupakan strategi penting untuk mencapai keberlanjutan pembiayaan. Mengandalkan satu sumber pendanaan saja, misalnya hanya dari iuran orang tua murid, dapat menjadi risiko besar jika terjadi penurunan kemampuan bayar dari para orang tua. Lembaga PAUD sebaiknya mencari sumber pendanaan lain seperti hibah dari pemerintah, sumbangan dari donatur, kerjasama dengan perusahaan, atau program beasiswa. Selain itu, kegiatan penggalangan dana seperti bazar atau konser amal juga dapat menjadi alternatif untuk menambah pemasukan. Pengelolaan dana yang transparan dan akuntabel adalah kunci menjaga kepercayaan semua pihak yang terlibat, termasuk orang tua murid, donatur, dan pemerintah. Lembaga PAUD harus memiliki sistem pencatatan keuangan yang baik dan rutin melakukan audit internal maupun eksternal. Laporan keuangan yang jelas dan dapat diakses oleh pihak terkait akan menunjukkan bahwa dana yang diterima digunakan dengan tepat dan efisien. Dengan demikian, keberlangsungan pembiayaan pendidikan di lembaga PAUD dapat terjaga, dan kualitas pendidikan yang diberikan pun semakin meningkat.

Sebelum penyampaian materi dilakukan ketua Tim, peserta diberikan sepuluh pertanyaan untuk menggali pengetahuan dasar peserta penyuluhan tentang manajemen pembiayaan pendidikan yang berkelanjutan, sekaligus sebagai ruang pre-test bagi peserta (hasil pre-test dapat dilihat pada Grafik 1). Jawaban peserta menjadi dasar bagi tim untuk menyampaikan materi penyuluhan tentang manajemen pembiayaan pendidikan yang berkelanjutan pada penyelenggaraan PAUD. Materi yang disampaikan fokus kepada konsep tentang manajemen pembiayaan pendidikan yang berkelanjutan pada lembaga PAUD, pengelolaan BOP, penyusunan RKAS, implementasi, dan juga bagaimana melakukan *self assessment* terhadap pelaksanaan pembiayaan yang dilakukan. Kegiatan penyampaian materi penyuluhan berlangsung kurang lebih 45 menit. Sebagaimana tampak pada Gambar 4 peserta tetap serius dan bersemangat mengikuti penyuluhan hingga tahap akhir. Pada sesi terakhir, pemateri menyampaikan kepada pemandu kegiatan agar memberikan kesempatan pada peserta penyuluhan untuk mengajukan pertanyaan terkait dengan materi penyuluhan yang sudah disampaikan.



**Gambar 4.** Penyampaian Materi

Manajemen pembiayaan pendidikan yang berkelanjutan adalah konsep yang penting dalam memastikan bahwa institusi pendidikan dapat terus beroperasi tanpa henti dan memberikan layanan pendidikan yang berkualitas. Berkelanjutan bermakna adanya proses secara terus menerus yang menunjukkan kemampuan organisasi untuk memenuhi misinya dan melayani kepentingan pelanggan organisasi dari waktu ke waktu (Kurniady et al., 2014). Keberlanjutan melibatkan seluruh elemen dan fungsi organisasi, dan setiap keputusan besar yang dibuat dalam organisasi — dari sumber daya manusia hingga keuangan hingga pemberian layanan — harus dipertimbangkan melalui filter keberlanjutan. Keberlanjutan finansial juga dapat diukur dari pendapatan bersih (surplus pendapatan atas pengeluaran); likuiditas (kas yang tersedia untuk membayar tagihan); dan solvabilitas (hubungan aset dan hutang atau kewajiban). Selain itu, keberlanjutan pembiayaan juga

Penyuluhan manajemen pembiayaan pendidikan yang berkelanjutan bagi pengelola pendidikan anak usia dini.

mengacu pada kemampuan untuk mempertahankan kapasitas keuangan waktu (Cernostana, 2017). Manajemen pembiayaan pendidikan yang berkelanjutan dominan difokuskan untuk memastikan tujuan lembaga tercapai dengan adanya jaminan pendapatan yang cukup untuk memungkinkan lembaga tersebut berinvestasi dalam kegiatan pendidikan di masa depan (Afriyie, 2015).

Mempertahankan kemampuan untuk menyediakan kebutuhan sekolah secara internal merupakan tantangan tersendiri dalam pengelolaan pembiayaan pendidikan termasuk di lembaga PAUD (Altalibi, 2024). Dalam karya yang berjudul *Sustainable Educational Finance Management: Principles and Practices*, sebagai sebuah proses, maka manajemen pembiayaan pendidikan yang berkelanjutan didefinisikan sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya keuangan dalam bidang pendidikan untuk memastikan kontinuitas layanan pendidikan dengan efisiensi dan efektivitas yang optimal (Laktionova et al., 2022). Manajemen pembiayaan pendidikan yang berkelanjutan juga dipahami sebagai strategi keuangan yang dirancang untuk memaksimalkan sumber daya yang ada dan meminimalkan risiko keuangan, dengan tujuan untuk mendukung tujuan pendidikan dalam jangka panjang.

Hal yang harus diperhatikan dalam implementasi manajemen pembiayaan pendidikan yang berkelanjutan adanya tantangan dan peluang dalam pendanaan pembangunan berkelanjutan. Bagaimana pun juga, pembangunan pendidikan berkelanjutan adalah konsep yang menggabungkan pertumbuhan ekonomi, inklusi sosial, dan perlindungan lingkungan dalam upaya mencapai kesejahteraan jangka panjang. Pendanaan untuk pembangunan jenis ini memerlukan pendekatan yang holistik, inovatif, dan kolaboratif, mengingat kompleksitas masalah yang dihadapi (Ziolo & Sergi, 2019). Pada lembaga PAUD, tantangan pembiayaan berkelanjutan dapat mempengaruhi kualitas dan aksesibilitas pendidikan. Keterbatasan sumber daya finansial sering kali menyebabkan minimnya fasilitas dan bahan ajar yang memadai untuk mendukung pendidikan yang berkualitas di PAUD. Selain itu, ketidakpastian ekonomi dapat berdampak pada ketersediaan dana untuk pelatihan dan pengembangan profesional bagi para pendidik, yang sangat penting dalam memberikan pendidikan yang berkualitas pada anak-anak usia dini (Sanisah & Santosa, 2023). Integrasi kebijakan pembangunan berkelanjutan dengan sistem pendidikan juga memerlukan upaya ekstra agar PAUD tidak hanya fokus pada aspek akademis tetapi juga menanamkan nilai keberlanjutan sejak dini.

Mengatasi tantangan ini, kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil sangat diperlukan. Pemerintah perlu menyusun kebijakan yang mendukung alokasi dana yang memadai untuk PAUD, termasuk untuk program yang mengedepankan keberlanjutan. Sektor swasta dapat berperan melalui *corporate social responsibility* (CSR) dan investasi pada program pendidikan berkelanjutan. Masyarakat sipil juga dapat terlibat dalam advokasi dan pengawasan pelaksanaan kebijakan agar dana yang dialokasikan benar-benar digunakan secara efektif. Dengan demikian, tantangan dalam *financing sustainable development* dapat diatasi secara lebih komprehensif dan inklusif, sehingga PAUD dapat menjadi fondasi yang kuat untuk pembangunan berkelanjutan di masa depan.

Dalam sesi diskusi dan tanya jawab, terdapat tiga orang peserta yang menyampaikan pertanyaan dan satu permintaan. Pertanyaan yang disampaikan terkait dengan tahapan dalam penyusunan RKAS sesuai dokumen perencanaan pengembangan yang dimiliki oleh lembaga, cara menyusun perencanaan strategis yang sesuai dengan kondisi lembaga atau sekolah, dan contoh konkrit implementasi prinsip manajemen dalam pengelolaan pembiayaan pendidikan berkelanjutan secara real. Permintaan yang disampaikan dalam kesempatan ini adalah melanjutkan kegiatan penyuluhan ke pendampingan penyusunan RKAS berdasarkan prinsip pengelolaan pembiayaan pendidikan yang berkelanjutan untuk lembaga PAUD.

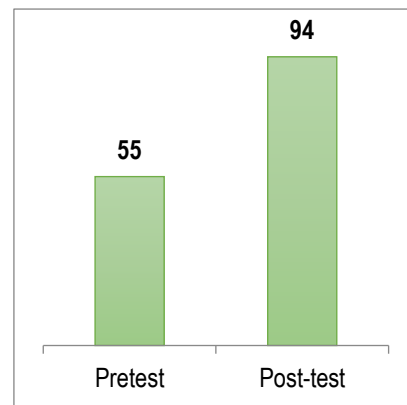
### **Control**

*Control* dan evaluasi terhadap kegiatan pengabdian dilakukan secara eksternal (LPPM) dan internal (tim pelaksana). Secara internal dilakukan dalam bentuk memberikan *pre-test* dan *post-test* kepada peserta, mendalami tanggapan peserta melalui testimoni, dan menyusun *action plan* pengabdian dalam bentuk penyusunan *draft* laporan, dilengkapi dokumentasi selama pelaksanaan kegiatan berlangsung. Setelah menjawab pertanyaan dari peserta, pemateri melakukan evaluasi

Penyuluhan manajemen pembiayaan pendidikan yang berkelanjutan bagi pengelola pendidikan anak usia dini.



terkait pemberian materi yang telah disampaikan dengan cara memberikan pertanyaan (*post-test*) dan memberikan kesempatan kepada peserta untuk menjawab pertanyaan tersebut. Peserta yang mampu menjawab pertanyaan mendapatkan *door prize* sebagai tanda apresiasi dan setelah itu kegiatan penyuluhan ditutup dengan kegiatan foto bersama antara pemateri dengan peserta penyuluhan.



**Gambar 5.** Capaian Pemahaman Peserta dalam Penyuluhan

Gambar 5 menunjukkan bahwa terjadi peningkatan pengetahuan yang signifikan pada peserta tentang manajemen pembiayaan pendidikan yang berkelanjutan sebelum dan setelah penyuluhan dilakukan. Sebelum penyuluhan dilakukan, pengetahuan dasar peserta penyuluhan hanya mencapai 55 poin dan meningkat sebanyak 39 menjadi 94 point setelah penyuluhan dilakukan. Capaian tersebut menunjukkan bahwa proses penyuluhan yang dilakukan berjalan lancar dan kondusif dan berkontribusi nyata dalam meningkatkan pemahaman dan keterampilan pengelola PAUD dalam mengelola keuangan secara efektif dan efisien. Dengan pengetahuan yang lebih baik tentang manajemen pembiayaan, lembaga dapat memastikan bahwa dana yang tersedia digunakan secara optimal untuk mendukung kegiatan pendidikan dan operasional lainnya. Pemahaman dan keterampilan pengelola PAUD dalam mengelola keuangan secara efektif dan efisien memiliki urgensi yang tinggi. Pengelolaan keuangan yang baik merupakan salah satu kunci utama untuk memastikan kelangsungan dan kualitas layanan pendidikan yang diberikan oleh PAUD. Dengan pengelolaan keuangan yang tepat, PAUD dapat memastikan bahwa setiap dana yang diterima, dari pemerintah, donatur, maupun dari sumbangan orang tua, dapat digunakan secara optimal untuk mendukung pembelajaran dan perkembangan anak.

Capaian ini juga dapat diperhatikan dari hasil observasi langsung dan wawancara singkat dengan peserta terkait pelaksanaan penyuluhan. Dalam penyuluhan ini *awariness* ditandai dengan perilaku peserta yang mengetahui tentang manajemen pembiayaan pendidikan yang berkelanjutan; *interest*, peserta ingin mengetahui lebih banyak tentang manajemen pembiayaan pendidikan yang berkelanjutan dengan cara mencari keterangan atau informasi lebih terperinci. Perilaku *evaluation*, peserta menilai dan menghubungkan penerapan pendekatan manajemen pembiayaan pendidikan yang berkelanjutan dengan kondisi atau kemampuan diri; *trial*, peserta belajar atau mencoba menerapkan manajemen pembiayaan pendidikan yang berkelanjutan untuk meyakinkan apakah dapat dilanjutkan atau tidak; dan *adoption*, peserta yakin untuk menerapkan manajemen pembiayaan pendidikan yang berkelanjutan. Perilaku sasaran pengabdian selama pelaksanaan kegiatan dapat digambarkan seperti pada Tabel 2.

**Tabel 2.** Ketercapaian Indikator Keberhasilan Penyuluhan

| Indikator         | Kriteria  |
|-------------------|---|
| <i>Arwariness</i> | Peserta memperhatikan dan mengikuti kegiatan penyuluhan dengan baik, dan menunjukkan ketertarikan yang tinggi karena dianggap sebagai hal baru yang akan menambah wawasan dan pengetahuan mereka tentang pengelolaan atau manajemen pembiayaan pendidikan yang berkelanjutan pada lembaga PAUD. Peningkatan |

Penyuluhan manajemen pembiayaan pendidikan yang berkelanjutan bagi pengelola pendidikan anak usia dini.

| Indikator         | Kriteria  |
|-------------------|---|
|                   | pengetahuan peserta dapat diperhatikan lebih lanjut pada Grafik 1 tentang hasil <i>pre-test</i> dan <i>post-test</i> .  |
| <i>Interest</i>   | Hal ini ditunjukkan dari sikap peserta yang sangat aktif ketika sesi diskusi dan tanya jawab berlangsung. Peserta penyuluhan juga meminta agar ada kegiatan lanjutan dari pengabdian dalam bentuk pendampingan penyusunan rencana strategis pengembangan lembaga PAUD hingga menyusun RKAS.   |
| <i>Evaluation</i> | Peserta penyuluhan mengakui bahwa mereka selama ini tidak menggunakan panduan atau konsep tertentu dalam menyusun perencanaan pembiayaan pendidikan di lembaganya. Bahkan 95% peserta mengakui bahwa lembaga mereka tidak memiliki rencana strategis, sehingga perencanaan operasional dan pembiayaan disusun cenderung mewakili keinginan dan berorientasi untuk memenuhi kebutuhan pada masa pendek. Sejalan dengan itu, peserta menyampaikan bahwa konsep yang diperkenalkan berpotensi dapat memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan lembaga PAUD yang sedang dikelola. |
| <i>Trial</i>      | Peserta juga ditunjukkan contoh pengelolaan pembiayaan pendidikan berkelanjutan yang sudah tertuang dalam RKAS. Peserta diminta untuk melakukan telaah dan mencoba untuk menyusun RKAS serupa khusus untuk lembaga masing-masing. Aktivitas pendampingan singkat tersebut, terlaksana dengan baik.  |
| <i>Adoption</i>   | Peserta berkomitmen untuk mengadopsi manajemen pembiayaan pendidikan berkelanjutan dalam menyusun perencanaan operasioln penggunaan anggaran pada lembaga masing-masing.  |

Kendala yang dihadapi selama dilakukannya penyuluhan adalah variatifnya pemahaman awal peserta tentang manajemen pembiayaan pendidikan yang berkelanjutan. Bahkan, hampir 60% peserta tidak pernah mendengar tentang hal tersebut. Menyikapi kondisi tersebut, tim menyampaikan materi secara perlahan dan dimulai dari konsep dasar serta contoh konkrit yang sederhana.

## SIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan dalam bentuk penyuluhan bersama mitra (IGTKI Kecamatan Jonggat) dengan melibatkan 26 orang pengelola PAUD sebagai sasaran berproses dengan baik. Hal ini terindikasi dari lancarnya pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan desain yang sudah ditetapkan sebelumnya, adanya peningkatan pemahaman peserta tentang materi penyuluhan terkait dengan manajemen pembiayaan pendidikan yang berkelanjutan dari 55 (*pre-test*) menjadi 94 (*post-test*), dan proses penyuluhan sesuai dengan target (indikator) yang sudah ditetapkan. Disarankan agar pemerintah daerah dan atau *stakeholder* yang berkompeten terhadap keberadaan PAUD dapat senantiasa mendampingi perkembangan lembaga PAUD secara interns. Salah satu cara yang dapat ditempuh adalah melakukan pelatihan, penyuluhan, atau bentuk lain yang sejenis sebagai upaya peningkatan kapasitas pengelola agar pengelolaan PAUD menjadi lebih terarah, efektif, dan efisien menuju pendidikan bermutu untuk semua.

## UCAPAN TERIMAKASIH

Disampaikan terima kasih kepada pihak yang sudah mendukung pelaksanaan pengabdian dan publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat ini seperti LPPM Universitas Muhammadiyah Mataram dan IGTKI Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

## DAFTAR RUJUKAN

Afriyie, A. O. (2015). Financial Sustainability Factors of Higher Education Institutions: A Predictive Model. *International Journal of Education Learning and Development*, 2(3), 17–38.

Penyuluhan manajemen pembiayaan pendidikan yang berkelanjutan bagi pengelola pendidikan anak usia dini.

- Altalibi, G. M. (2024). Financial Sustainability In Higher Education Institutions: Accounting Perspective. *Educational Esministration: Theory And Practice*, 2024(5), 1421–1426. <https://doi.org/10.53555/kuey.v30i5.3102>
- Basir, M. (2015). Pengaruh Kerja Tim Terhadap Kinerja Guru SMP. *Journal of EST*, 1(September), 8–19.
- Cernostana, Z. (2017). Financial Sustainability for Private Higher Education Institutions. *Institute of Economic Research*, 17(17), 1–10.
- Dakhi, Y. (2016). Implementasi POAC terhadap Kegiatan Organisasi dalam Mencapai Tujuan Tertentu. *Jurnal Warta*, 53(9), 1679–1699. <https://bit.ly/3ycD5sQ>
- Hidayat, A. N., Sauri, R. S., Rhamdani, N., Alam, R., & Kusmiyati, N. (2023). Manajemen Pembiayaan Pendidikan dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran di SMA Al Qona'ah Baleendah Kabupaten Bandung. *Muntazam: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 04(01), 30–37.
- Kurniady, D. A., Setiawati, L., & Nurlatifah, S. (2014). Education Financing Management on Quality of Vocational School. *Jurnal Penelitian Pendidikan*, 13(1), 263–269.
- Laktionova, A., Koval, S., & Prystupa, L. (2022). Financial Sustainability of Higher Education Institutions in The Context of Ensuring Their Developoment. *Khmelnyskyi National University, Ukraine*, 6(2), 95–100. <https://doi.org/10.31891/2307-5740-2020-288-6-14>
- Lee, R. D., Johnson, R. W., & Joyce, P. G. (2013). Public Budgeting Systems. In *Jones & Bartlett Learning Publisher* (Ninth Edit). Jones and Bartlett Publishers. [https://doi.org/10.1142/9789813222076\\_0018](https://doi.org/10.1142/9789813222076_0018)
- Maemunah, M., & Isnaini, I. (2023). Penyuluhan Pendidikan Politik Mahasiswa UMMAT Menjadi Pemilih Cerdas Menuju Integritas Pemilu 2024. *Jurnal Pengabdian Mandiri*, 2(10), 2177–2184.
- Mesiono, & Haidir. (2020). Manajemen Pembiayaan Pendidikan (Analisis Konsep dan Implikasinya Terhadap Peningkatan Mutu Pendidikan). *Jurnal Hikmah*, 17(2), 61–73.
- Muhajir, N. M. N., Bachtiar, M., & Fauzi, A. (2023). Pentingnya Manajemen Pembiayaan dalam Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 5(2), 4684–4689.
- Murdianingrum, Y., Sudiyono, Sulistiono, A. A., & Perdana, N. S. (2020). *Efektivitas Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini* (1st ed.). Pusat Penelitian Kebijakan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan: Jakarta.
- Rahmawati, S. N. A., & Supriyanto, A. (2020). Pentingnya Kepemimpinan dan Kerjasama Tim Dalam Implemeentasi Manajemen Mutu Terpadu. *Jurnal Dinamika Manajemen Pendidikan*, 5(1), 1–9. <https://doi.org/10.26740/jdmp.v5n1.p1-9>
- Sanisah, S. (2023). *Budget Policy in Education* (1st ed.). Deepublish: Yogyakarta.
- Sanisah, S., Edi, Ihsani, B. Y., Darmurtika, L. A., Arif, Tarmizi, M. A., Karim, S., & Banmalei, I. M. (2024). *Workshop Penyusunan Rencana Strategis Berbasis Blue Ocean Strategy*. 7(1), 123–135.
- Sanisah, S., & Santosa, H. (2023). Education Budget Fluctuation and Its Relevance to the Achievement of Human Development Index on the Dimension of Education. *Jurnal Kependidikan: Jurnal Hasil Penelitian Dan Kajian Kepustakaan Di Bidang Pendidikan, Pengajaran, Dan Pembelajaran*, 9(1), 140–150. <https://doi.org/10.33394/jk.v9i1.7041>
- Soemarti, L., & Kundrat, K. (2022). Faktor yang Mempengaruhi Perubahan Perilaku Masyarakat dalam Pemanfaatan Sampah Domestik untuk Bahan Baku Pembuatan (MOL) Sebagai Upaya Meningkatkan Sanitasi Lingkungan dalam Mendukung Gerakan Indonesia Bersih. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 12(2), 141–154. <https://doi.org/10.30999/jpkm.v12i2.2183>
- Sudarmono, S., Hasibuan, L., & Us, K. A. (2021). Pembiayaan Pendidikan. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 2(1), 266–280. <https://doi.org/10.38035/jmpis.v2i1>
- Susanto, M. (2019). The Legislative Role in The Budgeting Process in Indonesia. *ICONPO (International Conference on Public Organization)*, 9(2), 163–180. <https://doi.org/10.22212/jnh.v9i2.954>
- Ziolo, M., & Sergi, B. S. (2019). *Financing Sustainable Development: Key Challenges and Prospects* (1st ed.). Springer Berlin Heidelberg.

Penyuluhan manajemen pembiayaan pendidikan yang berkelanjutan bagi pengelola pendidikan anak usia dini.